

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan lajunya perkembangan yang sedang dilakukan oleh pemerintah serta masyarakat indonesia, dimana perekonomian masyarakat indonesia berkembang dengan cepatnya, maka setiap bidang pekerjaan memerlukan pengelolaan yang lebih baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Pelaksanaan pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah yang maksimal diperlukan kerjasama yang baik. Bentuk dari kerja sama itu tidak saja ditekankan pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan tetapi lebih penting lagi antara instansi pemerintah dan masyarakat harus ada kerjasama dan koordianasi diantara satu sama lainnya.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu demi masyarakat adil dan makmur, sehingga dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit untuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut. Dana tersebut diperoleh dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Sumber penerimaan dari dalam negeri salah satunya dari sektor pajak yang merupakan peran serta langsung dari masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sektor pajak merupakan sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional.

Pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber. Artinya pendapatan daerah

merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) Hasil pajak daerah (PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air)
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dari pajak daerah diatas, penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah adalah jenis pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor adalah (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh perorangan pribadi. Kendaraan bermotor sendiri merupakan semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.

Mencermati latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang Mekanisme Penghitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedalam bentuk tugas akhir dengan judul :

“MEKANISME PENGHITUNGAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PADA UPTD SAMSAT KOTA PADANG”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang ada di latar belakang masalah, maka perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme dalam Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ?
2. Apa saja Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ?



1.3 Tujuan Magang

Magang merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Adapun tujuan magang terbagi dari tujuan umum dan tujuan khusus yaitu sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Melengkapi SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan diploma III fakultas ekonomi universitas andalas
- b. Untuk mempraktekkan ilmu teori yang didapatkan dari ilmu perkuliahan ke lapangan (instansi pemerintah) yang sesuai dengan jurusan yaitu Keuangan Negara Dan Daerah Diploma III Universitas Andalas.
- c. Untuk mengetahui dan mengenal secara langsung dunia kerja nyata pada masa sekarang
- d. Memberikan kemampuan untuk menggunakan pemahaman yang diperoleh ditempat magang untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan usaha setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini.
- e. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Keuangan Negara dan Daerah, Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- f. Menyaksikan langsung penerapan ilmu yang telah dipelajari dalam praktek di lapangan.
- g. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap dunia kerja.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk dapat mengetahui dan memahami mekanisme penghitungan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada UPTD SAMSAT Kota Padang
- b. Untuk dapat mengetahui dan memahami cara penghitungan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada UPTD SAMSAT Kota Padang.

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penyusun

- a. Melatih kemampuan dan keterampilan mahasiswa Diploma III Keuangan Negara, Universitas Andalas Padang yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
- b. Dapat mengimplementasikan wawasan dan teori yang di peroleh dari Program Studi Diploma III Keuangan Negara, Universitas Andalas Padang.
- c. Dapat Mengetahui lebih dalam mengenai Mekanisme Penghitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada UPTD SAMSAT Kota Padang.

2. Bagi Universitas

Terjalannya kerjasama atau hubungan baik antara Universitas dengan Dinas/Perusahaan tempat magang. Universitas dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja magang dan Universitas juga akan dikenal di dunia industri kerja.

3. Bagi Tempat Magang

Dapat memberikan wawasan dan masukan yang dapat di pertimbangkan khususnya dalam penerimaan retribusi pasar agar lebih baik pelaksanaannya.



1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Berisikan tentang apa saja teori yang bersangkutan tentang mekanisme penghitungan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada UPTD SAMSAT Kota Padang.

BAB III Gambaran Umum

Gambaran umum SAMSAT Kota Padang, serta dasar hukum pembentukan SAMSAT Kota Paadang, visi misi tujuan dan sasaran SAMSAT Kota Padang, tugas pokok fungsi dan kewenangan SAMSAT Kota Padang, dan struktur organisasi SAMSAT Kota Padang.

BAB IV Pembahasan

Bab ini merupakan pengkajian hasil pembahasan lebih lanjut dan permasalahan yang ditemukan.

BAB V Penutup

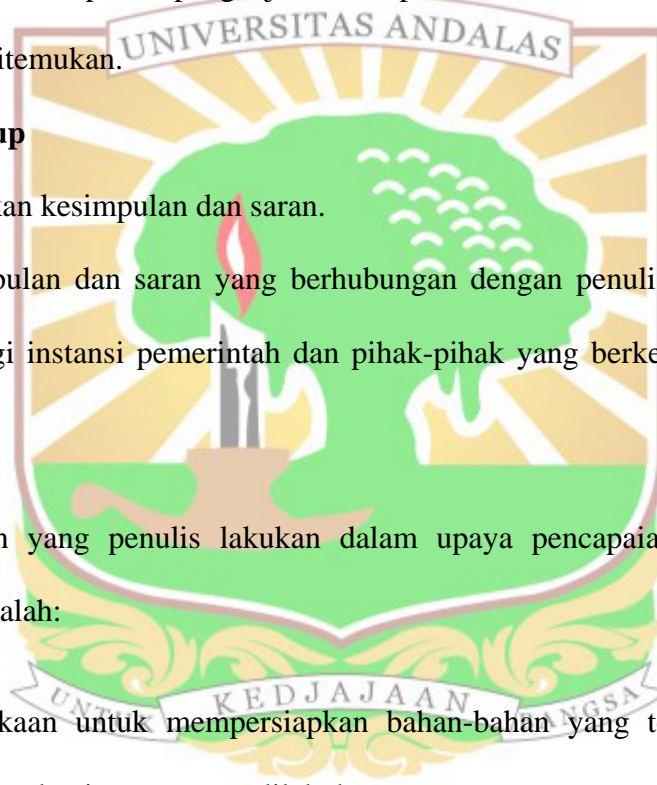
Berisikan kesimpulan dan saran.

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan laporan yang dapat menjadi masukan bagi instansi pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dimasa yang akan datang.

Berbagai kegiatan yang penulis lakukan dalam upaya pencapaian tujuan pelaksanaan magang antara lain adalah:

1. Studi kepustakaan untuk mempersiapkan bahan-bahan yang terkait dengan kegiatan magang sebelum kegiatan magangdilakukan.
2. Sosialisasi dengan lingkungan tempat magang
3. Mengetahui gambaran umum tempat magang dan profil lembaga
4. Ikut serta dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan judul penulis

1.6 Sistematika Tugas Akhir



Penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana disetiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut :

